

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan suatu negara adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menumbuhkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kurangnya kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan air bersih disebut kemiskinan. Kualitas hidup sangat berkorelasi dengan faktor-faktor ini. Kurangnya akses terhadap pekerjaan dan Pendidikan, yang dapat membantu seseorang keluar dari kemiskinan dan mendapatkan Kembali rasa hormat sebagai warga negara, juga bisa menjadi tanda kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan. Ketika suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri, maka ia dapat dikatakan sejahtera. Hal ini disebabkan karena angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga menyulitkan mereka untuk sepenuhnya terlibat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemiskinan seringkali menjadi tantangan utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena kemiskinan berkorelasi dengan lebih dari sekedar buruknya kesehatan, pendidikan dan partisipasi dalam proses pembangunan, maka kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau rumah tangga tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Palaneven, 2018).

Secara teori kemiskinan dapat dikatakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga atau keluarga, seperti sandang, pangan, minuman, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang mendapat pekerjaan dan kurangnya pendidikan. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik, maka ia dapat dianggap miskin. Penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, namun kemiskinan masih menjadi masalah yang terus berlanjut. Kemiskinan telah menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan.

Kemiskinan (Kuncoro, 2004) Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan kualitas hidup yang minimal. Hal ini juga terkait dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang standar, layanan kesehatan yang tidak memadai, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Kemiskinan adalah fakta yang belum sepenuhnya hilang dari muka bumi ini. Kesenjangan dalam sumber daya, peluang dan kemampuan merupakan akar penyebab kemiskinan. Chambers mendefinisikan kemiskinan sebagai satu konsep terpadu yang mempunyai lima dimensi: 1) kemiskinan yang wajar; 2) ketidakberdayaan; 3) keadaan kerentanan darurat; 4) ketergantungan; dan 5) daya saing (isoasi), baik secara sosiologi maupun geografis. Kemiskinan ialah ketidakmampuan untuk memperoleh produk dan uang yang diperlukan untuk bertahan hidup ketika seseorang atau sekelompok individu tidak mampu

mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal untuk standar hidup tertentu (Sugiarti, 2020).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius, maka pendekatan untuk menurangi kemiskinan juga harus mencakup kajian menyeluruh yang mempertimbangkan semua faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut dan solusi yang tepat, misalnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan adalah akibat dari buruknya kesehatan masyarakat, menurut para ahli kesehatan. Dari sudut pandang ekonomi, penyebab utama kemiskinan diperkirakan karena kurangnya keterampilan, kepemilikan alat produksi dan kemahiran teknologi.

Pemerintah daerah tentunya tidak ingin masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskina. Oleh sebab itu, pengeluaran pembangunan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menurunkan kemiskinan daerah. Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan akan meningkatkan taraf hidup setiap orang. Salah satu ukuran meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah menurunnya jumlah penduduk miskin setempat. indikatornya adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Berikut data jumlah penduduk miskin di kota makassar tahun 2013-2022 yang diperoleh dari BPS.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kota
Makassar Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	66 400	4,70
2014	64 230	4,48
2015	63 200	4,38
2016	66 780	4,56
2017	68 190	4,59
2018	66 220	4,41
2019	65 120	4,28
2020	69 980	4,54
2021	74 690	4,82
2022	71 830	4,58

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Di kota Makassar menunjukkan bagaimana tingkat kemiskinan terus menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Tabel 1 menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Makassar belum stbail dari tahun 2013 – 2022. Kota makassar mengalami peningkatan terbesar dalam proporsi penduduk miskin pada tahun 2021, yaitu sebesar 4,82%, sedangkan proporsi penduduk miskin terendah tercatat di kota makassar tersebut pada tahun 2015, yaitu sebesar 4,38%.

Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu daerah merupakan salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah. Jumlah penduduk yang tinggi berarti akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja,

sehingga jumlah lapangan kerja harus bertambah. Jika tidak, dampak jangka panjangnya adalah peningkatan angka kemiskinan.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur jumlah kemiskinan di berbagai daerah. Salah satu strategi untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah merupakan mesin pembangunan yang memerlukan sumber daya manusia berkaliber tinggi sebagai landasannya. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari sudut pandang kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Sektor pendidikan dan kesehatan memerlukan investasi pemerintah untuk meningkatkan peluang masyarakat untuk menjalani kehidupan yang terhormat. Hal ini dapat dicapai dalam hal ini dengan mengarahkan pendanaan publik ke sektor kesehatan dan kesehatan. Produktivitas masyarakat akan meningkat seiring dengan distribusi belanja publik yang lebih luas ke sektor publik. Sebaliknya, ketika produktivitas meningkat, pembangunan manusia juga cenderung meningkat, sehingga menurunkan prevalensi kemiskinan..

Penelitian yang dilakukan oleh (Hatta, 2018) mengemukakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Ajatappareng, artinya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan benar mempengaruhi tingkat kemiskinan, apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meningkat maka kemiskinan di wilayah

Ajatappareng menurun, begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menurun, maka kemiskinan akan meningkat. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Ajatappareng, artinya ketika pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan meningkat maka jumlah kemiskinan di wilayah Ajatappareng dapat menurun, begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menurun, maka kemiskinan akan meningkat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pemerintah dapat melakukan bermacam upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih terus terjadi, untuk menurunkan angka kemiskinan Kota Makassar, penulis berencana melakukan kajian dengan memanfaatkan pemerintah daerah sebagai standar rekomendasi kebijakan. Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya menjadi rumusan masalah untuk mengungkap solusi atas permasalahan tersebut. Berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kota Makassar ?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apakah Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori guna memahami variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan Kota Makassar.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah kota makassar untuk dipertimbangkan ketika menurunkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan di kota tersebut.